

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Interaksi antara berbagai negara dalam rangka mencapai kepentingan global dikenal sebagai hubungan internasional. Aspek-aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya umumnya termasuk dalam cakupan hubungan internasional. Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hubungan internasional merujuk pada disiplin ilmu yang mempelajari interaksi, koneksi, serta komunikasi antar negara-negara, terkait kebijakan luar negeri yang mencakup bidang diplomasi, konflik, kesejahteraan, ekonomi, dan perdamaian global. Setiap negara memiliki ketergantungan pada negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kondisi geografis dan sumber daya manusia yang bervariasi menyebabkan timbulnya ketergantungan saling antara negara-negara ini. Hubungan internasional muncul sebagai akibat dari tuntutan atau tujuan bersama ini. Hal ini menyiratkan bahwa memiliki hubungan internasional membawa manfaat yang signifikan bagi suatu negara. (Robert Jackson & Georg Sorensen, 2013)

Studi hubungan internasional adalah studi yang baru saja dimulai. Sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama, bidang keilmuan ini menjadi semakin aktif. Setelah Perang Dunia II, ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan

Uni Soviet terlibat dalam konflik politik di seluruh dunia, situasi dunia menjadi semakin suram. Tidak diragukan lagi, koordinasi yang buruk, miskomunikasi, dan kesalahpahaman antara kekuatan-kekuatan Eropa yang ada pada saat itu menyebabkan Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, hubungan antara kedua negara tidak terlalu dekat, baik secara diplomatik maupun konsuler. Hal ini kemudian memicu permusuhan, konflik, dan perang antar negara yang akhirnya dikenal sebagai Perang Dunia I, yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918. Untuk meningkatkan kolaborasi antar negara melalui hubungan diplomatik dan konsuler, hubungan internasional diciptakan pada masa ini dan dimaksudkan untuk menghapus prasangka negatif antar negara. Artinya, konflik dapat dihindari dan perdamaian dapat tercipta dengan komunikasi, koordinasi, kerja sama, sinergi, dan interaksi yang efektif antar negara. Tujuan mempelajari hubungan internasional pada dasarnya adalah untuk mempertimbangkan perilaku aktor-aktor seperti negara dan non-negara (organisasi internasional) di bidang perdagangan internasional. Tindakan tersebut dapat berupa perang, konflik, dan kerjasama dalam organisasi internasional. (John Lewis Gaddis, 1992)

Selain itu, bidang Hubungan Internasional dapat digunakan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi para pemimpin yang memahami hubungan internasional, terutama mereka yang aktif di tingkat manajemen global. Diperlukan pelatihan di bidang-bidang seperti sejarah, filsafat hubungan internasional, dan terutama bidang studi yang berfokus pada isu-isu politik internasional, organisasi internasional, dan ekonomi internasional. Hubungan Internasional berkembang sebagai bidang akademis, termasuk buku-buku teks dan

kurikulum universitas. Namun, pertumbuhannya sebagai bidang keilmuan dapat ditelusuri kembali ke masa Perang Dunia I, ketika ada upaya untuk mengorganisir dunia dalam satu forum internasional, seperti pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sebagai organisasi internasional menandai dimulainya era baru dalam studi hukum internasional, politik internasional, ekonomi internasional, dan organisasi internasional. Banyak buku teks dan peneliti yang telah dikembangkan sejak Perang Dunia I untuk membahas masalah-masalah di bidang hubungan internasional.

2.1.2 Diplomasi

Diplomasi memiliki peran sentral dalam merealisasikan kepentingan nasional suatu negara dan dianggap sebagai alat utama dalam meraih tujuan-tujuan nasional yang terkait dengan negara-negara lain atau organisasi internasional. Diplomasi dapat diibaratkan sebagai instrumen kunci dalam usaha mencapai kepentingan nasional dan membangun citra suatu negara. Dalam konteks hubungan antarnegara, diplomasi biasanya dimulai sejak awal ketika suatu negara berupaya membangun hubungan bilateral dengan negara lain, dan kemudian berkembang menjadi hubungan yang lebih mendalam di masa yang akan datang. (Rizki Rahmadini N, 2017 126-141)

Istilah diplomasi mengacu pada strategi politik yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dan memelihara kepentingan mereka melalui serangkaian perundingan, tanpa melibatkan kekerasan, propaganda, atau aspek hukum. Diplomasi melibatkan proses interaksi dan pertukaran informasi

antara berbagai pihak dengan maksud mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama. (G.R Berridge, 2010)

Bentuk diplomasi yang paling primitif dan awal adalah diplomasi bilateral, yang melibatkan dua pihak dan sering melibatkan misi kedutaan besar dan kunjungan kenegaraan. Sebagai contoh, Perjanjian Perdagangan Bebas antara Kanada dan Amerika Serikat dapat disebutkan sebagai contoh. Jenis lain dari diplomasi adalah diplomasi multilateral, yang melibatkan sejumlah besar pihak dan memiliki akar sejarah yang dapat ditelusuri hingga Kongres Wina. Salah satu contoh institusi diplomasi multilateral adalah PBB. Bentuk diplomasi multilateral juga dapat terjadi di antara negara-negara yang berdekatan atau berbagi wilayah tertentu, yang dikenal sebagai diplomasi regional. Diplomasi telah menjadi elemen penting dalam hubungan antarnegara dan menjadi alat utama untuk mengatasi isu-isu internasional dalam rangka mencapai perdamaian global. Melalui diplomasi, pemerintah berupaya mencapai tujuan mereka dan mendapatkan dukungan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang mereka anut. Sebagai proses politik, diplomasi memiliki fokus utama untuk menjaga kebijakan luar negeri suatu pemerintah serta memengaruhi kebijakan dan sikap negara lain. (Asep Setiawan, 2016)

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Ketika suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain, berbagai strategi dalam konteks kebijakan luar negeri harus diterapkan sesuai dengan kepentingan nasional negara tersebut. Bahkan dalam ranah hubungan internasional, kebijakan-kebijakan ini perlu saling terhubung atau dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi di dalam negeri.

Istilah kebijakan luar negeri, atau foreign policy dalam bahasa Inggris, memiliki beragam definisi dalam bidang Studi Hubungan Internasional. Kebijakan merangkum serangkaian komponen, termasuk nilai-nilai, upaya pencapaian tujuan, serta pilihan dan tindakan yang diambil oleh negara dalam konteks hubungan internasional. Politik luar negeri diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu komunitas atau negara dengan maksud mengubah perilaku negara lain dan juga sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan internasional (Goerde Modelski, 1962).

Kebijakan luar negeri juga didefinisikan sebagai pemikiran atau tindakan pengambil keputusan untuk mengatasi berbagai permasalahan atau mendorong perkembangan yang beragam. Ini dapat berupa langkah-langkah, perilaku, atau kebijakan yang diambil oleh pelaku negara atau non-negara dalam lingkungan internasional. (Kalevi Jaakko Holsti, 1970)

Secara singkat, kebijakan luar negeri merujuk pada sekumpulan elemen yang mengatur cara sebuah negara berinteraksi dengan negara-negara lain atau entitas non-negara di panggung internasional. Agar keuntungan dari kerja sama multilateral dapat dioptimalkan, prosesnya perlu secara berkala dianalisis dan dievaluasi. Kebijakan luar negeri, pada umumnya, melibatkan tindakan dalam bidang ekonomi, politik, dan militer yang sejalan dengan kepentingan negara. Pelaksanaan kebijakan luar negeri ini memiliki banyak tujuan utama, salah satunya adalah menjaga keamanan. Hampir setiap negara menghadapi tantangan terkait

keamanan nasional. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan luar negeri menjadi sangat penting dalam upaya memperkuat keamanan dan kedaulatan negara. Selain itu, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi berbagai masalah dalam dan luar negeri sesuai dengan prioritas atau kepentingan negara, sehingga dikenal sebagai bentuk otonomi yang disebut kebijakan luar negeri.

Tidak hanya itu, keberadaan kebijakan luar negeri juga memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi warga negara. Untuk menangani berbagai permasalahan dalam negeri, negara akan mengimplementasikan kebijakan luar negeri ekonomi. Ini dapat melibatkan promosi aset dan pertumbuhan ekonomi, perdagangan sumber daya, serta langkah-langkah ekonomi lainnya. Kebijakan luar negeri juga memiliki dampak penting terhadap status negara dalam konteks hubungan internasional. Status ini memiliki nilai yang signifikan dalam mendapatkan penghormatan dari negara-negara lain. Sebagai contoh, negara yang menerapkan kebijakan militer memiliki kemungkinan besar mendapatkan status dan reputasi yang unik di mata negara-negara lain.

2.1.4 Strategi Internasional

Definisi umum dari strategi adalah upaya individu atau kelompok untuk mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, strategi adalah seni menggunakan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk membantu individu atau kelompok mencapai tujuan dengan menggunakan metode yang dipandang efektif dan efisien. Kata strategi juga dapat berarti kegiatan

yang dilakukan untuk menanggapi setiap reaksi atau perubahan lingkungan. Baik keadaan yang diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi. (Novi V, 2021)

Strategi merujuk pada rencana terencana dan terpadu yang dirancang untuk mencapai tujuan atau sasaran jangka panjang dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal dan sumber daya internal. Dalam konteks yang lebih luas, strategi melibatkan alokasi sumber daya secara efisien untuk mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mencapai posisi yang diinginkan di masa depan. Strategi seringkali diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, militer, pemerintahan, dan organisasi non-profit.

Strategi melibatkan serangkaian keputusan yang cermat tentang arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Proses perumusan strategi melibatkan analisis menyeluruh terhadap lingkungan eksternal, seperti tren pasar, kompetisi, regulasi, dan perubahan sosial, serta penilaian internal terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi atau entitas yang bersangkutan. Selama perumusan strategi, langkah-langkah penting meliputi mengidentifikasi tujuan jangka panjang, merumuskan rencana tindakan yang spesifik untuk mencapai tujuan tersebut, menilai risiko yang mungkin muncul, dan mengembangkan metode pemantauan dan penilaian untuk memastikan bahwa strategi tetap berjalan sesuai rencana. Implementasi strategi juga melibatkan alokasi sumber daya yang tepat, koordinasi yang efektif, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tak terduga.

Dalam konteks hubungan internasional, strategi mengacu pada serangkaian rencana dan tindakan yang dirancang oleh negara atau entitas internasional untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam dinamika global yang kompleks. Strategi dalam hubungan internasional melibatkan pemahaman mendalam tentang dinamika politik, ekonomi, sosial,

dan keamanan di tingkat internasional, serta kemampuan untuk mengelola interaksi dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan berbagai aktor non-negara lainnya.

Dalam konteks ini, strategi melibatkan pemilihan tujuan-tujuan jangka panjang yang mencerminkan kepentingan nasional atau tujuan-tujuan global yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan ini mungkin berkaitan dengan diplomasi, perdagangan internasional, keamanan nasional, penyebaran nilai-nilai budaya, penanganan isu-isu lingkungan, dan banyak hal lainnya. Rencana tindakan yang terkait dengan strategi ini melibatkan pertimbangan matang tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan merespons tantangan dan peluang yang ada di lingkungan internasional.

2.1.5 Keamanan Internasional

Keamanan internasional mencakup usaha yang dijalankan oleh entitas nasional dan internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tujuan menjaga keselamatan dan stabilitas pemerintahan di seluruh dunia. Ini melibatkan berbagai tindakan, upaya, dan operasi baik yang bersifat militer maupun non-militer, serta melibatkan pendekatan diplomatik seperti perjanjian dan konvensi. Keamanan nasional dan internasional terkait erat karena bahaya terhadap keamanan nasional dapat dengan mudah meluas menjadi tantangan keamanan internasional, yang dapat menyebabkan perang. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan keamanan internasional adalah dengan melakukan langkah-langkah diplomatik dan kolaborasi lintas negara untuk menghindari perang. (Barry Buzan, 2009)

Penamaan studi keamanan internasional sendiri merupakan pembahasan seputar keamanan. Studi ini tidak muncul dari awal pembahasan, melainkan melalui

beberapa tahap pembahasan hingga mendapat penyebutan keamanan internasional seperti pada masa kini. Masih sering terjadi perdebatan mengenai definisi keamanan internasional, sehingga tidak ada definisi secara absolut. Para ahli memiliki perspektif atau sudut pandangnya masing-masing dalam mendefinisikan studi keamanan internasional itu sendiri.

Dalam buku Barry Buzan dan Lene Hansen yang berjudul *The Evolution of International security Studies* (2009), dipaparkan perdebatan epistemologi dan keamanan yang menyangkut pemahaman bagaimana pengetahuan tersebut dapat diperoleh, sehingga dalam studi keamanan mempertanyakan juga bagaimana seseorang harus mempelajari keamanan. Perdebatan definisi keamanan dari segi epistemologi dibagi dalam perbedaan antara definisi objektif, subjektif dan diskursif. Definisi keamanan objektif dan subjektif dapat dilihat dari teks klasik awal dalam tulisan Wolfers yang berjudul *National Security as an Ambiguous Symbol*. Menurut Wolfers, definisi keamanan objektif mengukur tidak adanya segala ancaman terhadap nilai-nilai yang sudah diperoleh dan ditanamkan. Sehingga baginya sulit untuk mengukur keamanan dengan subjektif yang menekankan pada perasaan terancam atau tidaknya. Rumusan Wolfers ini mampu menggambarkan bagaimana ketegangan konsepsi keamanan antara objektif dan subjektif.

Definisi keamanan secara subjektif merujuk pada pentingnya sejarah dan norma, rasa ketakutan dan prasangka atau persepsi, serta konteks relasional yang membingkai ancaman seperti mana teman, saingan, musuh atau pihak netral. Pendekatan ini mempercayai bahwa perlu untuk melihat faktor-faktor non-material

disamping faktor material. Sehingga pandangan subjektif tentang keamanan dianggap lebih akurat dibanding pandangan objektif yang hanya mengukur aspek material maupun ancaman secara objektif, namun bukan berarti pandangan subjektif menyampingkan aspek tersebut. Sebaliknya definisi keamanan secara diskursif menganggap konsepsi objektif tidak dapat diterima atau menyesatkan. Dengan berasumsi bahwa tidak segala hal masuk atau dapat dijadikan sebagai keamanan. Pertama, tidak semua isu politik diposisikan sebagai prioritas dalam kepentingan keamanan sekaligus. Kedua, konstruksi diskursif menyatakan bahwa sejarah, posisi geografis dan strukturalnya dari suatu negara, serta reaksi dari negara lain baik secara internasional maupun domestik yang kemudian mempengaruhi ancaman keamanan.

2.1.6 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional, seperti dijelaskan dalam Kamus Hubungan Internasional, merujuk pada tujuan utama dan faktor paling krusial yang digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk mengarahkan serta memengaruhi kebijakan luar negeri. Hans J. Morgenthau mengartikan kepentingan nasional sebagai semangat mencapai kekuasaan oleh sebuah negara, di mana kekuasaan didefinisikan sebagai segala elemen yang memperkuat dan menjaga pengaruh negara atas negara lain. Morgenthau juga menggarisbawahi bahwa gagasan kepentingan nasional sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Konstitusi Amerika Serikat dalam dua hal, yaitu kesejahteraan masyarakat umum dan hak atas perlindungan hukum. Konsep ini juga melibatkan aspek minimal, yakni menjaga identitas fisik, politik, dan budaya suatu negara dari campur tangan negara lain. (Trahadastadie, 2019).

2.1.7 Konflik Internasional

Analisis konflik internasional adalah ilmu pengetahuan yang menggabungkan teori dan sejarah. Kami berusaha untuk mengingat perubahan dan konstanta saat kami menenun jalan kami melalui teori dan contoh-contoh sehingga kami dapat lebih memahami masa lalu, masa kini, dan menavigasi beting masa depan dengan lebih baik. (Joseph Nye, 2014)

Konflik internasional merujuk pada benturan atau pertentangan antara dua atau lebih negara atau entitas internasional yang melibatkan perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, atau sumber daya yang dapat memunculkan ketegangan atau bahkan eskalasi ke bentuk konfrontasi fisik atau non-fisik. Konflik semacam itu dapat muncul dari berbagai sumber, seperti perbatasan yang tidak tuntas, klaim wilayah yang saling tumpang tindih, persaingan ekonomi atau perdagangan, agresi militer, ideologi yang bertentangan, perbedaan etnis atau agama, atau pertentangan politik. Akar penyebab konflik internasional seringkali rumit dan berlapis-lapis, melibatkan sejarah panjang, kompleksitas kebijakan, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi dan respons pihak yang terlibat.

Konflik internasional secara historis telah digunakan untuk menggambarkan perselisihan antara berbagai negara-bangsa dan konflik antara individu dan kelompok di dalam negara-bangsa tersebut. Namun, istilah ini semakin sering digunakan untuk menggambarkan perselisihan antara kelompok-kelompok yang tinggal di negara yang sama, terutama ketika satu kelompok berlomba-lomba untuk meraih kemerdekaan atau pengaruh yang lebih besar di bidang sosial, politik, atau ekonomi.

Konflik internasional yang bersifat publik biasanya jauh lebih sulit untuk diselesaikan. Awalnya hanya mengacu pada perselisihan antara negara-bangsa yang berdaulat, istilah "internasional" telah merujuk pada peningkatan jumlah konflik intra-nasional atau intra-kelompok selama dua dekade terakhir. Kedaulatan kelompok etnis atau wilayah tertentu, atau kesetaraan kelompok-kelompok etnis tersebut dalam sistem politik, sosial, dan ekonomi masyarakat mereka sendiri, telah menjadi poin utama dari perdebatan dalam sebagian besar kasus-kasus ini. (Cate Malek, 2013)

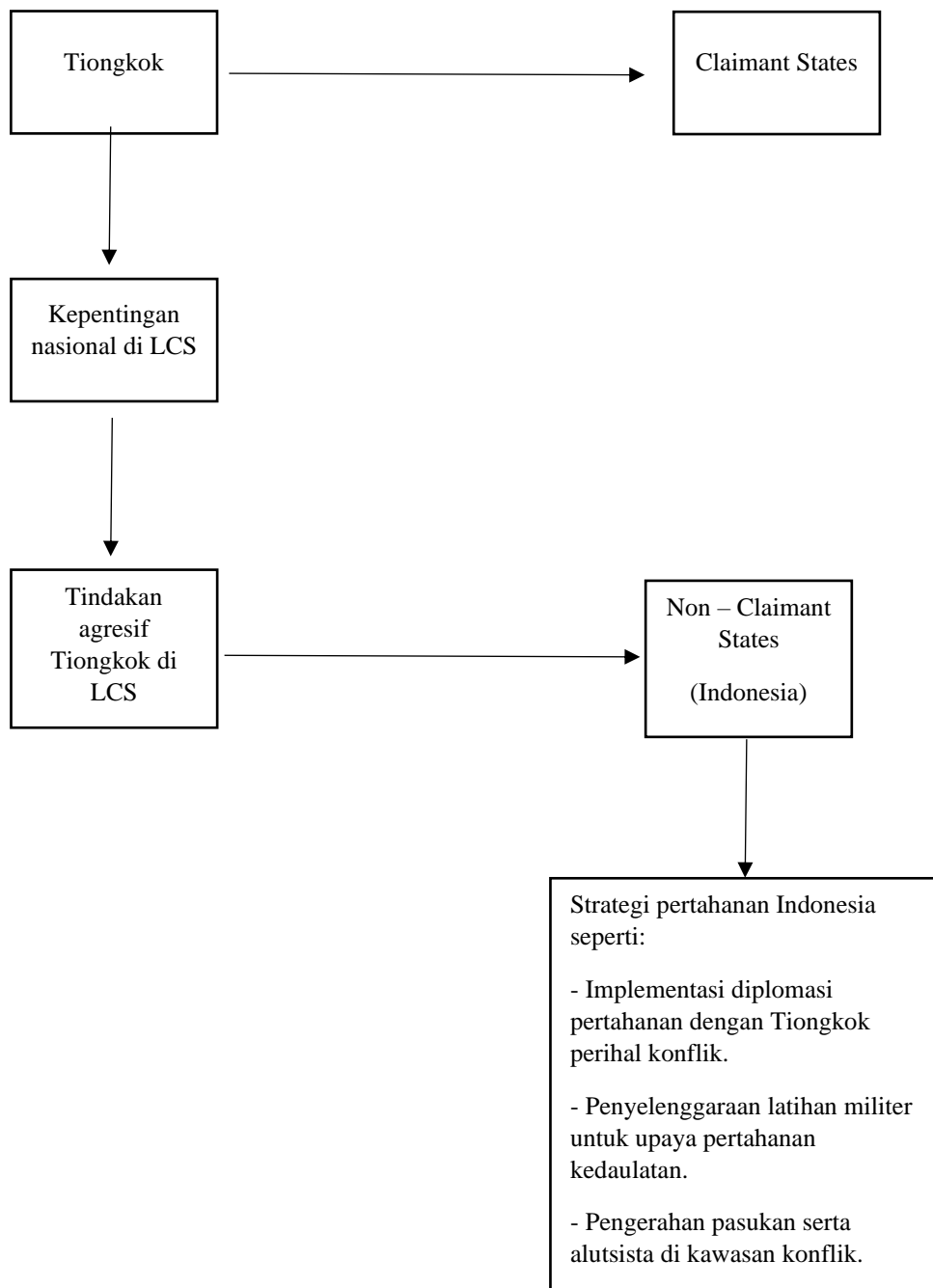
2.2 Kerangka Pemikiran

Persengketaan maritim yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama di Laut China Selatan mengandung potensi untuk mengancam stabilitas keamanan di tingkat regional dan global, mengingat signifikansi strategis, ekonomis, dan politis yang melekat pada wilayah tersebut. Laut China Selatan memiliki nilai yang sangat penting, baik dari segi strategis, ekonomis, maupun politis. Sebagai jalur pelayaran internasional utama, Laut China Selatan memiliki peran vital dalam perdagangan global, dan juga merupakan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi serta keanekaragaman hayati, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perselisihan yang tengah berlangsung di wilayah Laut China Selatan berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat dan juga akan berdampak pada daerah sekitarnya.

Lingkungan ekonomi yang tidak sehat akan menghambat kemajuan negara, karena ekonomi adalah faktor penting yang menentukan kinerja dari sebuah negara. Selain itu, negara juga akan menghadapi kerugian dan ketidakstabilan akibat

perselisihan yang terjadi. Konflik yang terjadi juga akan menyebabkan perpecahan di berbagai wilayah. Setiap wilayah memiliki pandangan atau masalah regional masing-masing yang dimana perbedaan tersebut dapat menyebabkan suatu konflik. Dalam hal ini, perdamaian harus selalu diupayakan oleh setiap pihak ataupun negara agar tidak ada lagi perselisihan atau masalah lain antar negara dan agar hubungan diplomasi yang baik dapat terjalin dan menjadi acuan bagi setiap negara. Perselisihan yang terjadi juga akan merugikan berbagai negara dalam hal politik dan akan menimbulkan suatu pembatas antar pihak. Hal ini akan membuat hubungan politik menjadi keras dan sulit dalam mencapai perdamaian yang diinginkan oleh setiap negara. Hal ini juga akan mendorong dan meningkatkan berbagai bentuk persekutuan militer, bertambahnya tingkat perselisihan antar negara dan kemungkinan terjadinya peperangan antar negara.

Berdasarkan penalaran dari kerangka pemikiran tersebut, dapat diilustrasikan dengan alur kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran

Sumber: Pengolahan data oleh peneliti